

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST)



**OLEH
RICARDO TRICIPTO NAPANG
B111 09 367**

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERADILAN IN ABSENTIA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST)

Oleh:

RICARDO TRICIPTO NAPANG

B111 09 367

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST)

Disusun dan diajukan oleh

RICARDO TRICIPTO NAPANG

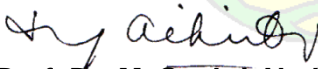
B111 09 367

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 21 Agustus 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

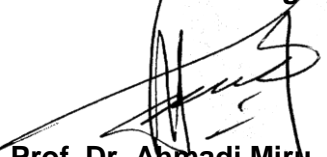
Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631034 198903 1 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **RICARDO TRICIPTO NAPANG**
No. Pokok : **B111 09367**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Proposal : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

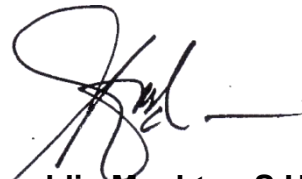
Makassar, Mei 2015

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631034 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **RICARDO TRICIPTO NAPANG**

No. Pokok : **B111 09367**

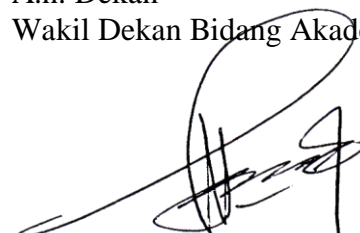
Bagian : **Hukum Acara**

Judul Proposal : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Perkara Nomor:
1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2015

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1003

ABSTRAK

RICARDO TRICIPTO NAPANG (B111 09 367). Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST), dibimbing oleh M.Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum peradilan in absentia dalam perkara nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST dan untuk mengetahui proses beracara dan eksekusi peradilan in absentia dalam putusan nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST., buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa a) landasan peradilan in absentia dalam perkara nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST yaitu para Terdakwa telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pula telah melakukan pemanggilan melalui surat kabar akan tetapi para Terdakwa tidak hadir, Majelis Hakim mengartikan tentang pengertian in absentia secara luas, yaitu pemeriksaan in absentia harus dikenakan kepada siapa saja yang menurut sangkaan dan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili secara in absentia baik orang tersebut diketahui keberadaannya maupun tidak diketahui keberadaannya, diluar maupun di dalam negeri. b) proses beracara dalam perkara in absentia hampir sama dengan perkara biasa yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang membedakan adalah para tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak hadir dalam proses peradilan. Eksekusi dalam putusan nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. hanya dilakukan pada harta kekayaan para Terpidana, sedangkan eksekusi badan tidak dapat dilakukan sehubungan para Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

ABSTRACT

RICARDO TRICIPTO NAPANG (B111 09 367). A Juridical To The Court In Absentia In Cases Of Corruption (Case Study Of The Decision Of The Number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST), was guided by M. Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar.

This research aims to know the law courts in absentia in the case number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST and to know the process be on the agenda and the execution of justice in absentia in the decision of the number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

Research is done in the central jakarta district court. By studying the data obtained from the interview and by the study of literature which is the decision of the number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST., books, documents, as well as regulations related to the problem are discussed.

Based on the results of the facts and data that is, then a writer take the conclusion that a) the court in absentia in the case number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST of the defendants have been called in to by prosecutors and also have to call through the newspapers would be but the defendant not present, the panel of judges represented about understanding in absentia in the area, namely examination in absentia should be imposed to anyone who according to the suspicion and allegations of committing corruption can be examined and brought to trial in absentia of good people are known to exist and is not known to exist outside and inside the country. b) the process be on the agenda in the case in absentia is similar to the case, namely the investigation, prosecution, and the examination in the trial court. The difference is the suspect and legal counsel is not present in court. Execution in the decision of the number 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST, only be done on the wealth of the convict, while the execution of the body can not be done in connection with the defendant is not known to exist.

KATA PENGANTAR

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya”

(Pengkhotbah 3:11)

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaan-Nya yang tak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hanya dengan tuntutan dan penyertaan-Nya sehingga berbagai hambatan dan kesulitan yang Penulis hadapi dapat dilalui dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat orang tua, Babe Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. dan Mamilong Elyantini Palimbunga, S.E. yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta mengiringi setiap langkah Penulis dengan doa dan dukungan. Kepada Mardani Pracipto Napang, S.H., Donald Duocipto Napang, S.H., dan Yusticia Pratiwi Napang, S.H., dan seluruh keluarga besar Penulis, terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu melalui kesempatan ini Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing Penulis serta dengan sabar dan penuh rasa tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi Penulis.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., H. M. Imran Arief, S.H., M.Si., Abd. Asis, S.H., M.H., selaku dosen penguji.
5. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu kepada Penulis.
6. Pak Bunga, Pak Usman, Kak Tia, dan Kak Tri selaku pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat-sahabat Plontos yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis.
8. Kawan-kawan KKN gelombang 95 Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
9. Kawan-kawan KKN posko Kelurahan Baru MJ, Lisa, Lina dan Agung.
10. Teman-teman Doktrin Angkatan 2009.
11. Denali Widyastuti, S.E., selaku calon Ibu dari anak-anak, yang telah memberikan semangat kepada Penulis.

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis telah banyak menemui hambatan, baik yang ekstern maupun intern. Hanya dengan semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi doa dan usaha maka kendala-kendala tersebut dapat Penulis lalui. Sadar atas keterbatasan Penulis sebagai manusia biasa, sehingga penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Harapan Penulis kiranya ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Amin.

Makassar, Mei 2015
Penulis,

Ricardo Tricpto Napang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
A. Tindak Pidana Korupsi	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Pengertian Korupsi	9
3. Asas-Asas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	12
4. Jenis-Jenis Korupsi	17
B. Peradilan In Absentia	21
1. Peradilan	21
2. In Absentia.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang dapat Diadili secara In Absentia selain Tindak Pidana Korupsi	31

BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	38
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 39
A. Landasan Hukum Peradilan In Absentia dalam Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST	39
1. Posisi Kasus.....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
3. Requisitoir/ Tuntutan Jaksa	68
4. Putusan Hakim	71
5. Landasan Hukum Peradilan In Absentia dalam Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST	73
B. Proses Beracara dan Eksekusi Peradilan In Absentia dalam Perkara Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST	81
1. Proses Beracara Peradilan In Absentia	81
1.1. Penyidikan dalam Peradilan In Absentia	81
1.2. Penuntutan dalam Peradilan In Absentia	82
1.3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	83
C. Eksekusi	86
 BAB V. PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal itu dikarenakan korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak tatanan sistem hukum, menghambat jalannya demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good governance*), serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan digolongkannya korupsi ke dalam kejahatan luar biasa maka penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk Pengadilan khusus tindak pidana korupsi dan membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu,

upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia).

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi.

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bersesuaian dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dimaksudkan untuk “menyelamatkan kekayaan negara” baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa juga bersesuaian dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. Artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan

dalam waktu yang singkat. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 mewajibkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara dalam waktu 6 (enam) bulan. Bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang tidak dapat menyelesaikan suatu perkara dalam batas waktu yang ditentukan, diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Nampaknya, Peradilan secara *in absentia* tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 1 sub 15 yang mengatakan bahwa "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan". Dalam pasal tersebut dikemukakan definisi atau pengertian terdakwa, namun tidak ditemukan adanya keharusan dari terdakwa hadir di persidangan untuk dituntut, diperiksa dan diadili.

Pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun

kehormatannya.¹ Kehadiran terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan diatas, menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan peradilan in absentia dalam perkara putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana proses beracara dan eksekusi peradilan in absentia dalam perkara putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum peradilan in absentia dalam perkara putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

¹ Marwan Effendy, 2010, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, Jakarta, Timpani Publishing, hal. 7

- b. Untuk mengetahui proses beracara dan eksekusi peradilan in absentia dalam perkara putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum;
- b. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan tindak pidana korupsi dalam peradilan in absentia.
- c. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentuk undang-undang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Semestara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.²

Jonkers juga menggunakan peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³

² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 94

³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 75

R. Tresna menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana. Namun beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Dalam Kamus Besar Belanda Indonesia karya S. Wojowasito, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman, untuk hukuman, diancam dengan hukuman; *baar* yang berarti dikenakan, dan *feit* yang diterjemahkan dengan fakta, kenyataan, peristiwa. Jadi

⁴ Adami Chazawi, *ibid*, hal. 72-73

⁵ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 91

strafbaar feit adalah peristiwa yang dikenakan dan diancam dengan hukuman.⁶

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷

Moeljatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan suatu istilah yang kurang tepat untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan alasan⁸:

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *starfbaar feit* sebenarnya abstrak) yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan tindak tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

⁶ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, 1997

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal. 25

⁸ Adami Chazawi, *ibid*, hal 72

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum delicta*” karena:⁹

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya);
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi.

Perbedaan pandangan di atas membuat penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.

2. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu

⁹ Amir Ilyas, *ibid*, hal. 23-24

corruptie (*korruptie*). Yang kemudian dari bahasa Belanda tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁰

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah seperti yang dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.¹¹

“corruption {L.corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word”

Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977).¹²

“Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.”

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk dan dapat disuap.¹³

Menurut S. Wojowasito, korupsi yang berasal dari kata *corruptie* atau *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup dan dapat disuap.¹⁴

¹⁰ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 4

¹¹ *The Lexicon, Webster Dictionary*, 1978

¹² Andi Hamzah, *ibid*, hal. 5

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

Definis korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyuapan, menurut pendapat Syed Husein Alatas yang mengemukakan tentang pengertian penyuapan menyatakan bahwa:¹⁵

“Seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Istilah ini juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.”

Dengan merujuk pada *Webster's Third New Dictionary*, David H. Bayley memberikan definisi korupsi adalah:

“Sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk (seperti misalnya suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (seorang pejabat pemerintah). Korupsi adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.”¹⁶

Definisi korupsi juga dikemukakan oleh lembaga internasional seperti *Transparency International* yang ditulis oleh Jeremy Pope yang mengemukakan mengenai pengertian korupsi adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Wojowasito, *ibid.*

¹⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*, Jakarta, Akademik Pressindo, hal. 257

¹⁶ David H. Bayley, *Webster's Third New Dictionary*, 1985, hal 86-90

¹⁷ Jeremy Pope, *Transparency International*, 1996

“Corruption involves behavior on the part of official in the public sector, weather politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them.”

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

3. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa asas yang tercantum di dalamnya. Adapun asas-asas tersebut sebagaimana yang disebutkan Prints adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pelakunya adalah setiap orang.

Pengertian setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari Badan Hukum (PT, IMA, Koperasi dan Yayasan) dan perkumpulan orang (Pasal 1 angka 3)

- b. Pidananya bersifat kumulatif dan alternatif.

Pasal 2 sampai Pasal 13, mengatur Pasal-Pasal tindak pidana korupsi, dimana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif dan alternatif seperti terlihat dari rumusan Pasal-Pasal yang berbunyi "... dipidana penjara ... tahun dan atau denda ... Rp ...". Adanya perkataan "... dan atau ..." menunjukkan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

- c. Adanya pidana minimum dan maksimum.

Pidana yang diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya mencegah hakim menjatuhkan putusan sesuka hati.

¹⁸ Prints Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 23-27

- d. Percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi dipidana sama dengan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formil).
- e. Setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (Pasal 16).
- f. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 18) seperti:
 - 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- g. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2)) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- h. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka terpidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, bila tidak ditemukan, maka tidak bisa digantikan.
- i. Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21).

- j. Orang yang sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana (Pasal 22).
- k. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
- l. Dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27).
- m. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan harta benda setiap orang maupun korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).
- n. Penyidik/ Penuntut Umum/ Hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka.
- o. Identitas pelapor dilindungi.
- p. Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat digugat secara perdata (Pasal 32 ayat (1)).
- q. Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).

- r. Ahli waris tersangka/ terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (Pasal 35 ayat (1)).
- s. Instansi yang dirugikan dapat menggugat (Pasal 35 ayat (2)).
- t. Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama (Pasal 36).
- u. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 37).
- v. Dapat diadili secara in absentia (Pasal 38 ayat (1)).
- w. Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 38 ayat (5)).
- x. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan (Pasal 38 ayat (7)).
- y. Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Jenis-Jenis Korupsi

Dalam buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tujuh macam, antara lain:¹⁹

- a. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara
- Perbuatan yang merugikan keuangan negara dirumuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hal. 24-94

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap adalah perbuatan memberi dan/atau menerima uang dan/atau barang kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam UU PTPK, korupsi jenis ini dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK;
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
3. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
4. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
5. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
6. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
7. Pasal 11 UU PTPK;
8. Pasal 12 huruf a UU PTPK;
9. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
10. Pasal 12 huruf c UU PTPK;
11. Pasal 12 huruf d UU PTPK;
12. Pasal 13 UU PTPK;

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini, penyalahgunaan jabatan dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 8 UU PTPK;
2. Pasal 9 UU PTPK;
3. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
4. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
5. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Menurut dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada orang lain atau masyarakat.

Korupsi jenis ini dirumuskan pada Pasal 12 huruf e UU PTPK.

2. Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada pegawai negeri lainnya.

Korupsi jenis ini dirumuskan pada Pasal 12 huruf f UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pemborong (kontraktor), penjual bahan

bangunan, pengawas proyek, anggota TNI/Polri yang melakukan kecurangan atau membiarkan perbuatan curang pada waktu pembuatan bangunan atau penyerahan barang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selain itu pejabat atau penyelenggara negara yang merugikan orang lain dengan menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai juga termasuk dalam korupsi jenis ini.

Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan diatur dalam UU PTPK:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 3. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 4. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
 5. Pasal 7 ayat (2);
 6. Pasal 12 huruf h.
- f. Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan
- Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati sebuah proses seleksi yang disebut dengan tender.

Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan diatur pada Pasal 12 huruf i UU PTPK yang berbunyi:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, atau fasilitas lain.

Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi diatur pada Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK yang menyatakan bahwa:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

B. Peradilan dan In Absentia

1. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*Eindonderzoek*)

²⁰ Siddiqmads.wordpress.com

merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.²¹

Tujuan mengadakan pemeriksaan terhadap seseorang adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat (kebenaran materiil). Dalam hal ini, hakim bersifat aktif mencari kebenaran berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan menurut jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus di pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili sebuah perkara.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terdiri

²¹ K. Wantjik Saleh, 1983, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 59

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung kesemuanya adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Sesuai pasal 20 ayat 2, Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lain; dan
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya antara lain:²³

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1. Pengadilan Negeri

²³ Siddiqmads.wordpress.com

Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Provinsi tersebut.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbul oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

1. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- c. Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk

anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer

2. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama berwenang untuk:

a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:

1. Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan
3. Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk anggota suatu golongan atau

jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan yang telah disebutkan di atas tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat aktif atau mobile mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukumnya di daerah pertempuran.

2. In Absentia

In Absentia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*.²⁴

²⁴ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, hal. 98

Dalam perkembangannya, istilah *in absentia* tidak disebut dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, mengadili di luar kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita dan tidak menghukum pidana badan terhadap terdakwa.²⁵

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara *in absentia* disebut dengan istilah putusan *verstek*. Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah *verstek* dalam HIR ini yang diadopsi

²⁵ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Jakarta, Timpani Publishing, hal. 6

oleh KUHP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.²⁶

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana yang dapat Diadili secara In Absentia selain Tindak Pidana Korupsi

a. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dapat diadili secara in absentia adalah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati. Dasar hukum pemeriksaan secara in absentia terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari Reglemen untuk Landgerecht (Staatsblad 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah.”

²⁶ Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*

Yang dimaksud bab a yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas.

Hukuman yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana disebutkan pada Pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan adalah:

1. Pidana penjara;
2. Kurungan;
3. Denda dan;
4. Pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi.

b. Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 16 UU Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu:

1. Orang yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1)

Dalam pasal 16 ayat 1 ini, dimungkinkan adanya peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang dengan cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah meninggal tersebut melakukan tindak pidana.

Peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi bertujuan untuk merampas barang-barang yang telah disita (Pasal 16 ayat 1 huruf a)

2. Orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6)

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962, yang dengan orang yang tidak dikenal adalah orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.²⁷ Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan.²⁸ Dalam Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.”

Berdasarkan uraian di atas, penuntut umum harus sudah mengetahui nama lengkap dan tempat tinggal tersangka sebelum membuat surat dakwaan.

Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam tindak pidana ekonomi adalah:

1. Perampasan barang-barang yang telah disita.

²⁷ Andi Hamzah, *ibid*, hal. 50

²⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung, Alumni, hal. 23

2. Tindakan tata tertib berupa pembayaran sejumlah uang dengan memberatkan pada harta yang ditinggalkan terdakwa.

Putusan dalam tindak pidana ekonomi tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding, sesuai pada Pasal 16 ayat (5) UUTPE. Namun yang diperkenankan hanyalah pengajuan surat keberatan bagi orang yang berkepentingan (Pasal 16 ayat 3 UUTPE).

c. Tindak Pidana Subversi

Tindak pidana subversi diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris) yang artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut *Encyclopedia Americana*, subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan.²⁹

²⁹ library.ohiou.edu

Peradilan in absentia sangat dimungkinkan pada tindak pidana ekonomi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1)

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi:

“Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absentia).”

Mengenai putusan pengadilannya hendaknya diberitahukan kepada terdakwa dengan cara memuat putusannya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.

Putusan hakim dalam tindak pidana subversi dapat dilakukan upaya hukum banding sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat

(3) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi:

“Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terdapat kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang “Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang berkompeten;
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui penelaan literatur-literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur ilmiah, majalah, buletin, surat kabar, buku-buku, dan lainnya.

b. Sumber Data Lapangan

Dalam hal ini, sumber data lapangan yaitu lokasi penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan analisis, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi atau data-data melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo serta Pengacara untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang Peradilan In Absentia serta proses pemeriksaannya di muka sidang Pengadilan.

b. Studi Dokumentasi

Peneliti dalam hal ini mempelajari sejumlah dokumen yang berhubungan langsung dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi yang tidak dihadiri oleh terdakwa seperti Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan, dasar Dakwaan, Requisitor, dan Putusan Hakim.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Bab IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Peradilan In Absentia Dalam Putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

Peradilan in absentia merupakan proses mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut mulai dari pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.

Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain."

Selain itu, pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan dikarenakan keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti

sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa “alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sebelum penulis memaparkan landasan peradilan In Absentia dalam perkara nomor : 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST, terlebih dahulu penulis memaparkan posisi kasusnya.

1. Posisi Kasus

KESATU

Terdakwa I Hendra Rahardja selaku Komisaris Utama PT. Bank Harapan Santosa, Terdakwa II Eko Edi Putranto selaku Komisaris PT. Bank Harapan Santosa dan Terdakwa III Sherny Kojongian selaku Direktur PT. Bank Harapan Santosa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara terdakwa dengan M. Nur Tajeb, Drs. Andre Widijianto, Hendro Suwono, Tony Gunawan dan Asep Subandi (yang dituntut dalam perkara tersendiri) dan secara berturut-turut melakukan perbuatan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 bertempat di

Kantor PT. Bank Harapan Santosa Pusat Jalan Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat atau di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri mereka terdakwa atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh mereka terdakwa bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yang dalam hal ini secara melawan hukum telah menarik dan menggunakan dana dari PT. Bank Harapan Santosa baik yang dihimpun dari masyarakat / pihak ketiga dalam bentuk Tabungan, Deposito, Rekening Giro maupun dana yang merupakan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa : Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi (KI) serta Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara c/q Bank Indonesia sebesar Rp. 2.659.308.000.000,- (dua triliun enam ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara:

- Bahwa PT. BHS yang bergerak dalam bidang usaha Perbankan memiliki modal dasar per posisi akhir tahun 1992 berjumlah Rp. 69.000.000.000,- atau berkisar sekitar jumlah tersebut dan pada posisi akhir tahun 1996 terjadi penambahan hingga berjumlah Rp. 295.651.000.000,- atau berkisar jumlah tersebut.

- Bahwa disamping modal dasar berjumlah Rp. 295.651.000.000,- tersebut PT. BHS juga telah menghimpun dana masyarakat terhitung sejak tahun 1992 s/d 1996 dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan tabungan lainnya berjumlah seluruhnya Rp. 2.318.000.000.000,- atau berkisar sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada tahun 1994 PT. BHS juga telah menerima/memperoleh KLBI berupa Kredit Investasi berjumlah Rp. 3.000.000.000,- dan Kredit Modal Kerja Permanen berjumlah Rp. 3.000.000.000,- serta SBPU (Promes yang diterbitkan perusahaan group yaitu PT. Setio Harto Jaya Building ; PT. Inti Bangun Adhi Pratama ; PT. Artha Buana Sakti / PT. Prasetya Pertiwi ; PT. Eka Sapta Dirgantara ; PT. Gaya Wahana Abadi Sakti dan PT. Bintang Sarana Sukses) yang kemudian diendors oleh PT. BHS berjumlah Rp. 125.000.000.000,- atau berkisar sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa disamping Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemegang saham dari perusahaan terkait/perusahaan group PT. BHS yaitu : PT. Setio Harto Jaya Building, PT. Inti Bangun Adhi Pratama, PT. Artha Buana Sakti / PT. Prasetya Pertiwi, PT. Eka Sapta Dirgantara, PT. Gaya Wahana Abadi Sakti dan PT. Bintang Sarana Sukses.
- Bahwa sesuai kedudukan dan jabatan di PT. BHS, Terdakwa I selaku Komisaris Utama telah menunjuk Loan Committee yang terdiri dari para Komisaris dan para Direksi yang ada di PT. BHS sebagaimana surat persetujuan tanggal 26 Agustus 1991 dan surat penunjukna

Nomor : 01/DKOM/BHS/I/1995 tanggal 10 Januari 1995 dan Nomor : 07/BHS/SP-DKOM/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996, perihal pelimpahan kewenangan pemberian kredit dari Terdakwa I selaku Komisaris Utama kepada Komisaris dan Direksi sebagai anggota Loan Committee sehubungan dengan pemberian kredit kepada Nasabah PT.BHS.

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dan Surat Penunjukkan Loan Committee tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Komisaris PT. BHS dan pemegang saham 6 perusahaan group telah meminta kepada Loan Committee untuk memberikan kredit kepada perusahaan terkait / perusahaan group PT. BHS terhitung sejak tahun 1992 s/d 1996 sehingga oleh mereka Terdakwa I, II, dan III dalam kedudukannya selaku anggota Loan Committee bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya telah memberikan persetujuan kredit dengan rincian sebagai berikut :

I. Kredit yang diberikan oleh Loan Committee tahun 1992 kepada :

1. PT. Setio Harto Jaya Building : Rp. 94.300.000.000,-
2. PT. Inti Bangun Adhi Pratama : Rp. 105.000.000.000,-
3. PT. Artha Buana Sakti / : Rp. 190.800.000.000,-
PT. Prasetya Pertiwi
4. PT. Eka Sapta Dirgantara : Rp.185.000.000.000,-
5. PT. Gaya Wahana Abadi Sakti : Rp. 269. 000.000.000,-
- Sehingga berjumlah : Rp. 844.100.000.000,-

- Bahwa pada periode tahun 1993 dan 1994 tidak terdapat penambahan kredit kepada perusahaan group dimana posisi kredit pada tahun 1993 dan 1994 sama dengan posisi kredit tahun 1992.
- II. Bahwa pada periode tahun 1995 terjadi pemberian kredit oleh Loan Committee kepada :
- PT. Bintang Sarana Sukses : Rp. 45.000.000.000,-
- III. Kredit yang diberikan oleh Loan Committee tahun 1996 kepada:
1. PT. Setio Harto Jaya Building yang semula Rp.94.300.000.000,- bertambah menjadi berjumlah Rp. 479.353.000.000,-
 2. PT. Inti Bangun Adhi Pratama yang semula Rp.105.000.000.000,- bertambah menjadi berjumlah Rp.831.400.000.000,-
 3. PT. Artha Buana Sakti / PT. Prasetya Pertiwi yang semula Rp. 190.800.000.000,- bertambah menjadi berjumlah Rp. 755.743.000.000,-
 4. PT. Eka Sapta Dirgantara yang semula Rp.185.000.000.000,- bertambah menjadi berjumlah Rp.278.330.000.000,-
 5. PT. Gaya Wahana Abadi Sakti yang semula Rp.269.000.000.000,- menjadi berjumlah Rp.255.626.000.000,-

6. PT. Bintang Sarana Sukses yang semula Rp. 45.000.000.000,- bertambah menjadi berjumlah Rp.50.405.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.650.857.000.000,-

- Bahwa dari jumlah kredit Rp. 2.650.857.000.000,- tersebut, adalah termasuk kredit-kredit yang diberikan melalui 26 (dua puluh enam) lembaga pembiayaan yang berjumlah Rp.1.248.473.000.000,- yang kemudian dialihkan menjadi tanggung jawab kredit ke 6 (enam) perusahaan group tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Prasetya Pertiwi : Rp. 608.957.000.000,-
2. PT. Setio Harto Jaya Building : Rp. 257.725.000.000,-
3. PT. Gaya Wahana Abadi Sakti : Rp. 61.269.000.000,-
4. PT. Eka Sapta Dirgantara : Rp. 128.330.000.000,-
5. PT. Inti Bangun Adhi Pratama : Rp. 648.400.000.000,-
6. PT. Bintang Sarana Sukses : Rp. 5.405.000.000,-

- Bahwa proses pengajuan proses persetujuan pemberian kredit dan pencairan kredit baik yang langsung kepada perusahaan group maupun yang tidak langsung melalui 26 (dua puluh enam) lembaga pembiayaan yang berjumlah seluruhnya Rp.2.650.857.000.000,- tersebut, dilakukan atas permintaan mereka terdakwa kepada Loan Committe yang ditindak lanjuti dengan cara pemindah bukuan fasilitas kredit dari rekening PT. BHS ke rekening Perusahaan Group kemudian selanjutnya Terdakwa III selaku Direktur Kredit memanggil

para Debitur keenam Perusahaan Group untuk menandatangani surat perjanjian kredit, hal mana bertentangan dengan prosedur dan ketentuan pemberian kredit, bahkan menyimpang dari Prinsip Kehati-hatian dalam usaha Perbankan dan Asas Pemberian Kredit yang Sehat sesuai syarat-syarat pemberian kredit oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pemberian Kredit Bank, karena :

- Pemberian kredit tidak disertai surat permohonan kredit;
- Pemberian kredit tidak disertai dengan analisa audit;
- Pemberian kredit tidak melalui keputusan Rapat Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. BHS pada Pasal 11 Akta Nomor 105 tanggal 24 Desember 1979;
- Pemberian kredit tidak didukung dengan agunan/jaminan kredit yang dapat mengcover nilai kredit yang harus dikembalikan;
- Agunan atau Jaminan Kredit pada umumnya berubah sertifikat tanah yang bukan milik debitur dan dinilai dengan transaksi yang tinggi;
- Tujuan dan penggunaan kredit tidak dijelaskan untuk keperluan apa;

Sehingga perbuatan para terdakwa selaku Komisaris dan Direksi PT. BHS telah bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengisyaratkan bahwa pemberian kredit mengandung resiko,

sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya para terdakwa memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang sehat dalam arti adanya keyakinan dari jiwa para terdakwa atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban, sehingga para terdakwa selaku kreditur seharusnya melakukan penilaian yang seksam terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur tersebut, namun semuanya tidak dilakukan para terdakwa tersebut.

- Bahwa pencairan dan penggunaan kredit-kredit yang telah diterima oleh perusahaan group tersebut, ternyata bukan dicairkan dan digunakan oleh Direksi ke 6 perusahaan group tersebut melainkan dicairkan dan digunakan oleh mereka terdakwa, bukan untuk pengembangan usaha dari ke 6 perusahaan tersebut, melainkan digunakan oleh mereka terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka terdakwa dan atau keluarga mereka terdakwa, serta untuk mengembangkan usaha PT. BHS, yang antara lain dipergunakan untuk :

1. Beli tanah di Ujung Pandang di 3 (tiga) lokasi yang seluruhnya seluas 3,4 Ha atas nama BUDIMAN RAHARDJA (anak HENDRA RAHARDJA);
2. Beli tanah di Majalaya Bandung seluas 450 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;

3. Beli tanah di Bendungan Hilir Jakarta Pusat seluas 243 M2 atas nama HERLINA MERYANTI;
4. Beli tanah di Jakarta di 3 (tiga) lokasi, masing-masing Jelambar, Matraman dan Jalan Enggano, seluruhnya seluas 2,4 Ha atas nama EKO EDI PUTRANTO;
5. Beli tanah di Jalan K.H. M. Mansur, Mangga Besar, dan Pasar Minggu, seluruhnya seluas 468 M2 atas nama LIE KESSY LISYANTO (Dirut PT. Prasetya Pertiwi);
6. Beli tanah di Surakarta seluas 138 M2 atas nama JONI RIYANTO (anak HENDRA RAHARDJA);
7. Beli tanah di Surakarta seluas 187 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA (anak HENDRA RAHARDJA);
8. Beli tanah di Bandung seluas 376 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
9. Beli tanah di Bandung seluas 115 M2 atas nama BUDI HARSONO (ipar HENDRA RAHARDJA);
10. Beli tanah di Bandung seluas 781 M2 atas nama PT. Aman Tena Abadi;
11. Beli tanah di Magelang seluas 1150 M2 atas nama JONI RIANJANTO (anak HENDRA RAHARDJA);
12. Beli tanah di Probolinggo 2 (dua) lokasi seluas 1.144 M2 dan 956 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;

13. Beli tanah di Ngawi seluas 200 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
14. Beli tanah di Jakarta di 3 (tiga) lokasi seluas 66 M2, 66 M2 dan 77 M2 atas nama HERLINA MERYANTI;
15. Beli tanah di Jakarta seluas 13.000 M2 atas HARTONO HADI SURYO;
16. Beli tanah di Jakarta seluas 3.098 M2 atas nama PT. Jaya Lestari;
17. Beli tanah di Surabaya 2 (dua) lokasi seluas 8.630 M2 dan 740 M2 atas nama JHONY RIANJANTO;
18. Beli tanah di Bandung 2 (dua) lokasi seluas 138 M2 dan 137 M2 atas nama EKO BUDI PUTRANTO;
19. Beli tanah di Sumedang seluas 412 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
20. Beli tanah di Jakarta seluas 9 (sembilan) lokasi 836 M2, 337 M2, 1.672 M2, 1358 M2, 906 M2, 1023 M2, 334 M2, 520 M2 dan 426 M2 atas nama HENDRA RAHARDJA;
21. Beli tanah dan bangunan toko di Jakarta seluas 147 M2 atas nama PT. Wirakarsa Widhitama;
22. Beli tanah di Jakarta seluas 15.637 M2 atas nama ABDUL KARIM SALIM;
23. Beli tanah di Jakarta seluas 36.161 M2 atas nama PT. Harapan Motor;

24. Beli tanah di Jakarta seluas 2.587 M2 atas nama HARRY HARYONO;
25. Beli tanah di Jakarta seluas 3.216 M2 atas nama LENA SALEHA;
26. Beli tanah di Jakarta seluas 4.712 M2 atas nama BUDI HARTONO;
27. Beli tanah di Bandung seluas 363 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
28. Beli tanah di Bandung seluas 299 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
29. Beli tanah di Bandung seluas 2.980 M2 atas nama BUDI HARTONO;
30. Beli tanah di Bandung seluas 200 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
31. Beli tanah di Yogyakarta seluas 1.963 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
32. Beli tanah di Yogyakarta seluas 1.500 M2 atas nama HERLINA MERYANTI;
33. Beli tanah di Bali 3 (tiga) lokasi seluas 625 M2, 200 M2, dan 400 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
34. Beli tanah di Tangerang 3 (tiga) lokasi seluas 2.065 M2, 705 M2, dan 2.088 M2 atas nama HERLINA MERYANTI;
35. Beli tanah di Semarang seluas 2.535 M2 atas nama PT. Bhaskara Langgen;

36. Beli tanah di Surakarta 3 (tiga) lokasi seluas 271 M2, 2.408 M2 dan 148 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
37. Beli tanah di Surakarta seluas 455 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
38. Beli tanah di Tasikmalaya seluas 320 M2 atas nama BUDI HARTONO;
39. Beli tanah di Garut seluas 97 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
40. Beli tanah di Jakarta 2 (dua) lokasi seluas 1.524 M2 dan 1.370 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
41. Beli tanah di Sukabumi seluas 110 M2 atas nama BUDI HARTONO;
42. Beli tanah di Jember seluas 110 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
43. Beli tanah di Ciamis 2 (dua) lokasi seluas 260 M2 dan 74 M2 atas nama BUDI HARTONO;
44. Beli tanah di Bandung seluas 351 M2 atas nama JOHNNY RIANJANTO;
45. Beli tanah di Bandung seluas 142 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
46. Beli tanah di Yogyakarta 2 (dua) lokasi seluas 1.654 M2 dan 1.366 atas nama JOHNNY RIANJANTO;

47. Beli tanah di Bali seluas 400 M2 atas nama JOHNNY RIANJANTO;
48. Beli tanah di Ujung Pandang seluas 1.057 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
49. Beli tanah di Bekasi seluas 1.365 atas nama SRI WASIHASTUTI;
50. Beli tanah di Bekasi seluas 225 M2 atas nama H. MERYANTI;
51. Beli tanah di Cianjur seluas 620 M2 atas nama TAN LEE SIENG;
52. Beli tanah di Medan 2 (dua) lokasi seluas 110 M2 dan 81 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
53. Beli tanah di Bandung seluas 242 M2 atas nama EKO BEDI PUTRANTO;
54. Beli tanah di Bandung seluas 34.068 M2 atas nama PT. Aman Tenar Abadi;
55. Beli tanah di Temanggung seluas 1.158 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
56. Beli tanah di Kediri 4 (empat) lokasi seluas 1.509 M2, 484 M2, 480 M2, dan 424 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
57. Beli tanah di Tegal seluas 134 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
58. Beli tanah di Purwokerto 2 (dua) lokasi seluas 806 M2 dan 1.322 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
59. Beli tanah di Jakarta seluas 1.943 M2 atas nama PT. Harapan Motor;

60. Beli tanah di Jakarta seluas 148 M2 atas nama JOHNNY RIANJANTO;
61. Beli tanah di Jakarta seluas 62 M2 atas nama HERLINA MERYANTI;
62. Beli tanah di Pekanbaru seluas 9.970 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
63. Beli tanah di Yogyakarta seluas 58.558 M2 atas nama PT. Bhaskara Kemakmuran;
64. Beli tanah di Bandung seluas 291 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
65. Beli tanah di Bali 2 (dua) lokasi seluas 297 M2 dan 263 M2 atas nama EKO EDI PUTRANTO;
66. Beli tanah di Bali 4 (empat) lokasi seluas 12.160 M2, 2.020 M2, 9.510 M2, dan 9.570 M2 atas nama PT. Centra Wisata Dwijasa;
67. Beli tanah di Bandung seluas 1.850 M2 atas nama BUDI HARTONO;
68. Beli tanah di Bandung 3 (tiga) lokasi seluas 744 M2, 115 M2, dan 93 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
69. Beli tanah di Cikampek seluas 129 M2 atas nama BUDI HARTONO;
70. Beli tanah di Madiun 5 (lima) lokasi seluas 1.450 M2, 825 M2, 174 M2, 231 M2 dan 706 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;

71. Beli tanah di Yogyakarta seluas 105 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
72. Beli tanah di Blitar seluas 7.067 M2 atas nama BUDIMAN RAHARDJA;
73. Beli tanah di Bandung seluas 1.538 M2 atas nama JOHNNY RIANJANTO;
74. Beli tanah di Bekasi seluas 235 M2 atas nama YAOGA SANTOSO;
75. Beli tanah di Bekasi seluas 265 M2 atas nama HERLINA INDRAWATI;
76. Beli tanah di Bekasi seluas 540 M2 atas nama BUDI HARTONO;
77. Beli tanah di Jakarta 3 (tiga) lokasi seluas 160 M2, 425 M2, dan 115 M2 atas nama MOEDAS BIN MIOEN;
78. Beli tanah di Jakarta seluas 299 M2 atas nama ISHAK BIN NAIMIN;
79. Beli tanah di Jakarta seluas 2.130 M2 atas nama HOLID BIN NAWI;
80. Beli tanah di Jakarta seluas 325 M2 atas nama AFIAS BIN DERIS;
81. Beli tanah di Jakarta seluas 238 M2 atas nama HOLID BIN NAWI;
82. Beli tanah di Jakarta seluas 513 M2 atas nama NY. SOEDIONO;
83. Beli tanah di Jakarta seluas 89 M2 atas nama HOLID BIN NAWI;
84. Beli tanah di Jakarta 3 (tiga) lokasi seluas 3.360 M2, 44.642 M2, dan 315.340 M2 atas nama HENDRA RAHARDJA;

85. Beli tanah di Cilegon seluas 19.669 M2 atas nama PT. Genta Gumala;

atau setidaknya sebagian dari 85 lokasi tanah dan bangunan tersebut di atas.

- Bahwa dengan demikian tampaknya jelas pembelian tanah-tanah tersebut oleh mereka terdakwa adalah untuk memperkaya diri mereka terdakwa dan atau keluarga mereka terdakwa atau PT. Bank Harapan Santosa (PT. BHS).
- Bahwa sebagai akibat dari penggunaan dana fasilitas kredit yang sebagian besar tidak diperuntukkan pengembangan usaha dan tanpa jaminan/agunan, keenam debitur perusahaan group tersebut tidak mampu untuk mengembalikan kredit tersebut kepada PT. BHS, sehingga PT. BHS sendiri mengalami kesulitan dana sehingga dilikuidasi pada tanggal 1 Nopember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/121/Kep/Dir PT. BHS dilikuidasi dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa keadaan PT. BHS dinilai telah membahayakan kelangsungan usahanya oleh Bank Indonesia;
 - Kredit kepada Debitur Group telah mencapai 88 % dari keseluruhan kredit yang dibeikan oleh PT. BHS;
 - Debitur tersebut tidak pernah membayar bunga dan sudah termasuk kategori macet, sehingga pendapatan Bank tidak dapat menutupi biaya operasional;

- Tunggakan bunga debitur group naik rata-rata Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) setiap bulan sehingga kerugian Bank semakin besar;
- Bahwa para terdakwa selaku pengurus PT. BHS yang secara operasional memobilisasi/menghimpun dana dari masyarakat melalui Giro; Deposito dan Tabungan dan telah menerima KLBI dalam bentuk Kredit Investasi Rp.3.000.000.000,- dan KMKP Rp. 3.000.000.000,- serta SPBU sebesar Rp. 125.000.000.000,- yang kemudian oleh para terdakwa disalurkan dalam bentuk kredit yang sebagian besar diberikan kepada perusahaan group (88% dari seluruh fasilitas kredit PT. BHS), dimana kredit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada PT. BHS sehingga menjadi macet yang akhirnya PT. BHS dilikuidasi tanggal 1 Nopember 1997 dan mengakibatkan Negara Cq. Bank Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.857.000.000,- atau sejumlah kredit yang disalurkan kepada 6 (enam) perusahaan group PT. BHS.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo 34 c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) sub 1 e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA : (KHUSUS UNTUK TERDAKWA SHERNY KOJONGIAN)

Bahwa ia terdakwa Sherny Kojongian, selaku Direktur Treasury / Direktur Kredit / Direktur HRD pada PT. Bank Harapan Santosa secara berturut-turut pada waktu yang berlangsung dari tanggal 22 Agustus 1997 sampai dengan 31 Oktober 1997 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Agustus 1997 sampai dengan bulan Oktober 1997, bertempat di Kantor PT. Bank Harapan Santosa di Jalan Gajah Mada No. 7 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa mulai tanggal 20 Agustus 1997 rekening giro PT. Bank Harapan Santosa di Bank Indonesia mengalami saldo negatif sebesar Rp. 3.377.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi keesokan harinya tanggal 21

Agustus 1997 saldo negatif tersebut dapat ditutup sehingga menjadi saldo positif (saldo kredit) sebesar Rp.6.160.000.000,- (enam milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Namun demikian keesokan harinya tanggal 22 Agustus 1997 PT. Bank Harapan Santosa mengalami saldo negatif kembali sebesar Rp. 5.018.000.000,- (lima milyar delapan belas juta rupiah) dan kemudian secara terus menerus mengalami saldo negatif yang semakin hari semakin besar yang berlangsung sampai tanggal 31 Oktober 1997.

2. Bahwa terjadinya saldo negatif pada rekening giro PT. Bank Harapan Santosa di Bank Indonesia tersebut dikarenakan Bank Harapan Santosa sudah berada pada kondisi tidak sehat karena sekitar 88% atau sekitar Rp.2.659.308.000.000,- (dua trilyun enam ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta rupiah) dari kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Harapan Santosa diberikan kepada perusahaan group sedangkan kredit tersebut beserta bunganya tidak pernah dibayar kembali oleh perusahaan group.
3. Bahwa dalam kondisi yang dialami PT. Bank Harapan Santosa sebagaimana diuraikan pada angka 2, terjadi penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah PT. Bank Harapan Santosa sebagai akibat situasi moneter pada waktu itu.

4. Bahwa untuk membayar penarikan dana secara besar-besaran oleh para nasabah tersebut maka PT. Bank Harapan Santosa mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia agar memberikan fasilitas Over Draft baik untuk Kantor Pusat PT. Bank Harapan Santosa di Jakarta maupun Kantor Cabangnya di seluruh Indonesia, permohonan mana diajukan secara tertulis berturut-turut dari tanggal 21 Agustus 1997 sampai 31 Oktober 1997, yang semuanya ditujukan kepada Kepala Urusan UPB II Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Tanggal 21 Agustus 1997	:	Rp. 21.900.000.000,-
Tanggal 21 Agustus 1997	:	Rp. 14.000.000.000,-
Tanggal 21 Agustus 1997	:	Rp. 284.520.548,-
Jumlah	:	Rp. 36.184.520.548,-
4.2. Tanggal 22 Agustus 1997	:	Rp. 20.000.000.000,-
4.3. Tanggal 25 Agustus 1997	:	Rp. 66.050.000.000,-
4.4. Tanggal 26 Agustus 1997	:	Rp. 77.310.200.000,-
4.5. Tanggal 27 Agustus 1997	:	Rp. 143.275.000.000,-
4.6. Tanggal 28 Agustus 1997	:	Rp. 180.000.000.000,-
4.7. Tanggal 29 Agustus 1997	:	Rp. 271.000.000.000,-
4.8. Tanggal 01 September 1997	:	Rp. 323.000.000.000,-
4.9. Tanggal 02 September 1997	:	Rp. 300.000.000.000,-
4.10. Tanggal 03 September 1997	:	Rp. 320.500.000.000,-
4.11. Tanggal 04 September 1997	:	Rp. 390.000.000.000,-

4.12. Tanggal 05 September 1997	:	Rp. 372.950.000.000,-
4.13. Tanggal 08 September 1997	:	Rp. 407.900.000.000,-
4.14. Tanggal 09 September 1997	:	Rp. 430.500.000.000,-
4.15. Tanggal 10 September 1997	:	Rp. 448.100.000.000,-
4.16. Tanggal 11 September 1997	:	Rp. 455.600.000.000,-
4.17. Tanggal 12 September 1997	:	Rp. 454.600.000.000,-
4.18. Tanggal 15 September 1997	:	Rp. 493.100.000.000,-
4.19. Tanggal 16 September 1997	:	Rp. 498.900.000.000,-
4.20. Tanggal 17 September 1997	:	Rp. 487.200.000.000,-
4.21. Tanggal 18 September 1997	:	Rp. 481.800.000.000,-
4.22. Tanggal 19 September 1997	:	Rp. 515.350.000.000,-
4.23. Tanggal 22 September 1997	:	Rp. 538.800.000.000,-
4.24. Tanggal 23 September 1997	:	Rp. 526.100.000.000,-
4.25. Tanggal 24 September 1997	:	Rp. 534.300.000.000,-
4.26. Tanggal 25 September 1997	:	Rp. 541.017.000.000,-
4.27. Tanggal 26 September 1997	:	Rp. 505.500.000.000,-
4.28. Tanggal 29 September 1997	:	Rp. 546.850.000.000,-
4.29. Tanggal 30 September 1997	:	Rp. 571.000.000.000,-
4.30. Tanggal 01 Oktober 1997	:	Rp. 579.800.000.000,-
4.31. Tanggal 02 Oktober 1997	:	Rp. 583.500.000.000,-
4.32. Tanggal 03 Oktober 1997	:	Rp. 616.000.000.000,-
4.33. Tanggal 06 Oktober 1997	:	Rp. 651.339.000.000,-
4.34. Tanggal 07 Oktober 1997	:	Rp. 644.411.000.000,-

4.35. Tanggal 08 Oktober 1997	:	Rp. 668.000.000.000,-
4.36. Tanggal 09 Oktober 1997	:	Rp. 702.900.000.000,-
4.37. Tanggal 10 Oktober 1997	:	Rp. 745.500.000.000,-
4.38. Tanggal 13 Oktober 1997	:	Rp. 819.451.000.000,-
4.39. Tanggal 14 Oktober 1997	:	Rp. 852. 120.000.000,-
4.40. Tanggal 15 Oktober 1997	:	Rp. 878.400.000.000,-
4.41. Tanggal 16 Oktober 1997	:	Rp. 895.950.000.000,-
4.42. Tanggal 17 Oktober 1997	:	Rp. 942.660.000.000,-
4.43. Tanggal 20 Oktober 1997	:	Rp. 1.012.000.000.000,-
4.44. Tanggal 21 Oktober 1997	:	Rp. 1.045.000.000.000,-
4.45. Tanggal 22 Oktober 1997	:	Rp. 1.118.150.000.000,-
4.46. Tanggal 23 Oktober 1997	:	Rp. 1.142.600.000.000,-
4.47. Tanggal 24 Oktober 1997	:	Rp. 1.208.500.000.000,-
4.48. Tanggal 27 Oktober 1997	:	Rp. 1.318.700.000.000,-
4.49. Tanggal 28 Oktober 1997	:	Rp. 1.404.700.000.000,-
4.50. Tanggal 29 Oktober 1997	:	Rp. 1.442.800.000.000,-
4.51. Tanggal 30 Oktober 1997	:	Rp. 1.485.000.000.000,-
4.52. Tanggal 31 Oktober 1997	:	Rp. 1.573.100.000.000,-

Dengan demikian dalam kurung waktu antara 21 Agustus 1997 sampai dengan 31 Oktober 1997 ada 52 kali permohonan untuk memperoleh fasilitas Over Draft yang diajukan oleh PT. Bank Harapan Santosa ke Bank Indonesia dengang nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.573.100.000.000,- ditambah Rp.36.184.520.584,-

sama dengan Rp 1.609.284.520.584,- (satu triliyun enam ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), jumlah mana merupakan penjumlahan tersebut pada angka 4.1 dengan 4.52.

5. Bahwa permohonan PT. Bank Harapan Santosa kepada Bank Indonesia untuk memperoleh fasilitas Over Draft tersebut antara lain ditandatangani oleh terdakwa Sherny Kojongian dan dimaksudkan untuk menanggulangi banyaknya penarikan dana oleh nasabah-nasabah di Kantor Pusat dan di seluruh Cabang Kantor PT. Bank Harapan Santosa. Hal ini terlihat dari bunyi surat permohonan itu sendiri yang antara lain berbunyi :

“Sehubungan dengan masih adanya penarikan nasabah-nasabah, kami memohon kepada Bank Indonesia memberikan fasilitas Over Draft....”.

6. Bahwa terhadap permohonan-permohonan PT. Bank Harapan Santosa tersebut, khususnya untuk permohonan tertanggal 21 Agustus 1997, oleh pihak Bank Indonesia, dalam hal ini Kepala Urusan Pengawasan Bank II Ahmad Basuki, dibuatkan catatan tertanggal 21 Agustus 1997 yang ditujukan kepada Direksi Bank Indonesia yaitu Paul Soetopo Tjokronegoro yang pada pokoknya mengusulkan :

- a. Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang Bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetap diperkenankan bersaldo negatif sampai beberapa waktu sampai dengan gejolak pasar uang mereda.
- b. Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang Bank diperkenankan menarik secara tunai meskipun bersaldo debet untuk melayani penarikan-penarikan tunai dari nasabah penyimpan dana.
- c. Pada saat ini bank-bank yang telah mengalami saldo negatif adalah :
 - PT. Bank Harapan Santosa
 - PT. Bank Nasional
 - PT. Bank Nusa

Terhadap catatan Kepala Urusan Pengawasan Bank II tertanggal 21 Agustus 1997 tersebut, Direksi Bank Indonesia, dalam hal ini Paul Soetopo Tjokronegoro memberikan disposisi kepada Budiono berbunyi :

“Mhs. Arrangement ini sudah sesuai dengan keputusan Direksi”

dan atas disposisi ini Budiono memberikan disposisi *“setuju”*.

Dengan adanya disposisi ini maka pihak Bank Indonesia telah mengkreditkan ke rekening PT. Bank Harapan Santosa di Bank Indonesia dengan nomor rekening 523.096000 sebesar yang dimohonkan oleh PT. Bank Harapan Santosa yaitu sebesar Rp. 36.184.520.548,-

Sedangkan terhadap permohonan PT. Bank Harapan Santosa tertanggal 22 Agustus 1997 dan seterusnya sampai dengan tanggal 31 Oktober 1997, tidak diberlakukan prosedur sebagaimana permohonan tanggal 21 Agustus 1997, melainkan setiap permohonan langsung dikabulkan dengan cara mengkreditkan ke rekening PT. Bank Harapan Santosa dengan nomor rekening 523.096000 sehingga pemberian dana fasilitas Over Draft dari Bank Indonesia kepada PT. Bank Harapan Santosa menjadi sejumlah Rp.1.609.284.520.584 (satu triliun enam ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

7. a. Bahwa setelah mendapat fasilitas Over Draft, maka dana yang diperoleh dari Bank Indonesia tersebut tidak seluruhnya

dibayarkan oleh terdakwa kepada para nasabah umum yang menarik dananya, melainkan sebagian oleh terdakwa dibayarkan kepada Perusahaan Group PT. Bank Harapan Santosa yang juga menarik dananya dengan Cek, Bilyet Giro atau Deposito, pada perusahaan group yang menarik dana tersebut masih memiliki tunggakan kredit yang belum dibayar beserta bunganya.

b. Bahwa setelah mengetahui adanya penarik dana oleh perusahaan group tersebut maka Bank Indonesia secara berturut-turut telah melakukan teguran tertulis kepada PT. Bank Harapan Santosa, masing-masing dengan surat :

- tanggal 02 September 1997 Nomor 30/1105/UPB2/Ad B2
- tanggal 18 September 1997 Nomor 30/1252/UPB2/Ad B2
- tanggal 20 September 1997 Nomor 30/1505/UPB2/Ad B2

Yang isi pokok suratnya adalah :

“Agar Direksi PT. BHS menghentikan penarikan dana milik group dan menghentikan penyaluran Kredit kepada debitur terkait”.

c. Bahwa dengan adanya teguran dari Bank Indonesia tersebut maka pada tanggal 30 September 1997 telah dilangsungkan rapat

Direksi PT. Bank Harapan Santosa, rapat mana antara lain dihadiri pula oleh terdakwa selaku Direktur Dana/Treasury/Direktur Kredit/Direktur HRD.

Keputusan Rapat Direksi dimaksud antara lain adalah :

“Direktur yang membidangi dana/Treasury dan kredit agar benar-benar memperhatikan dan mematuhi peringatan Bank Indonesia tentang pemberian kredit baru dan atau penarikan dana oleh group. Hal ini agar ditegaskan juga kepada Pemimpin Cabang dan Capem”.

8. Bahwa walaupun sudah ada situasi sebagaimana diuraikan pada angka 7 a, b, c ternyata terdakwa tetap tidak memperhatikan teguran Bank Indonesia dan hasil rapat Direksi PT. Bank Harapan Santosa dan masih tetap melakukan pembayaran atas penarikan dana oleh perusahaan group yang menarik dananya melalui Cek, Bilyet Giro dan Dpeosito.

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atas, terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu badan yaitu Perusahaan yang terkait kepemilikannya dengan PT. Bank Harapan Santosa, antara lain PT. Arta Buana Sakti, PT. Gaya Wahana Abadi Sakti, Bank Guna Internasional, PT. Baruna Permai Sejahtera dan lain lain serta Hendra Rahardja, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang dalam

hal ini Bank Indonesia sebesar Rp. 305.345.074.000,- (tiga ratus lima milyar tiga ratus empat puluh lima tujuh puluh empat ribu rupiah) dan USS 2,304,809.36 (dua juta tiga ratus empat ribu delapan ratus sembilan dolar Amerika tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana oleh Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2001 No. Reg Perk. PDS-204/JKT.PST/07/2001 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2001, Para Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara Kumulatif sebagai berikut :

- **Dakwaan Kesatu**: terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, diancam pidana menurut: Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang

Nomor 31 Tahun`1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1
e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- **Dakwaan Kedua**: khusus terhadap terdakwa: Sherny Kojongian diancam dengan pidana menurut: Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Requisitoir/ Tuntutan Jaksa

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di
Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2002,
yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II
EKO EDI PUTRANTO dan Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN
bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi”
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo. 34
c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) sub 1 e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa I HENDRA RAHARDJA dengan pidana penjara Seumur Hidup dan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan; --

Terdakwa II EKO EDI PUTRANTO dengan pidana penjara Selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan ;

Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN dengan pidana penjara Selama 20 (dua puluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti yang berupa Tanah dan Bangunan berikut surat-surat (terlampir) dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp. 13.529.150.800,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa Dokumen Asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
6. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN yang diadili secara In Absentia terbukti secara sah dan “meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menghukum kepada Para Terdakwa In Absentia tersebut masing-masing :
 - Terdakwa I : HENDRA RAHARDJA dengan Pidana Penjara :
seumur hidup ;
 - Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dengan Pidana Penjara: **20 (dua puluh) tahun** ;
 - Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN dengan Pidana Penjara :
20 (dua puluh) tahun ;
3. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan ;

4. Menyatakan barang bukti yang berupa Tanah dan Bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp. 13.529.150.800,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa Dokumen Asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
6. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

5. Landasan Peradilan In Absentia Dalam Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

Secara yuridis formal, peradilan secara In Absentia hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara In Absentia. Tindak pidana tertentu tersebut antara lain:

1. Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962;
2. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
4. Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
5. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU TPK.

Terhadap Tindak Pidana Korupsi, peradilan In Absentia telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) yaitu :

“Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.”

Pengaturan tentang peradilan In Absentia dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 38 UU TPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang;
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum di papan Pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah atau diberitahukan kepada kuasanya;
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;

- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita;
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak dapat dimohonkan upaya banding;
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Menurut Sutarjo, landasan peradilan in absentia yaitu tersangka tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah meskipun sudah di panggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum. Lanjut beliau, peradilan in absentia ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum, sehingga dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum, Jaksa Penuntut Umum dapat dengan segera mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi dan menghukum para tersangka.

Peradilan In Absentia dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin dengan alasan:

1. Sesuai Pasal 38 UU TPK yang telah disebutkan diatas bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara sah atau patut ke alamat terdakwa tetapi terdakwa tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka terhadap terdakwa dapat dilakukan peradilan In Absentia;
2. Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga penyelesaiannya juga mesti dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi, oleh pembuat undang-undang memberi peluang dilaksanakannya peradilan tanpa kehadiran terdakwa atau In Absentia.
3. Demi pengembalian dan penyelamatan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada si pelaku melainkan juga untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi oleh pelaku.
4. Untuk mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka penegak hukum mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi.

Landasan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Rendra Rahardja, Eko Edi Putranto, dan Sherny Kojongian secara In absentia adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Agustus 2001 Nomor : 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, telah ditetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya para Terdakwa (In Absentia) dengan alasan para Terdakwa telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pula atas perintah Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan melalui surat kabar : MEDIA INDONESIA, TERBIT, REPUBLIKA dan SUARA PEMBARUAN akan tetapi para Terdakwa tidak hadir;
2. Bahwa seperti dimaklumi pada saat ini Pemerintah telah berupaya segiat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi ternyata dalam menindaklanjuti seringkali banyak hambatan-hambatan karena terbentur atau adanya kesulitan-kesulitan untuk mendatangkan para Terdakwa, mengingat yang bersangkutan tidak berada lagi di Negara Republik Indonesia akan tetapi telah berada di negara lain (luar negeri), sedangkan para Terdakwa tersebut

telah diduga merugikan keuangan negara yang jumlahnya tidak sedikit serta tidak dapat dipastikan kapan mereka ini kembali ke tanah air (Indonesia);

3. Bahwa apabila hal yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut yaitu pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikannya menunggu para Tersangka kembali ke tanah air sedangkan kembalinya belum dapat diketahui, akan mengakibatkan kerugian yang lebih banyak lagi karena harta kekayaan atau asset-asset yang ada di dalam negeri tidak dapat diapa-apakan, sedangkan dilain pihak masyarakat selalu menuntut agar segala bentuk kejahatan khususnya yang menyangkut tindak pidana korupsi segera diberantas;
4. Bahwa dengan adanya hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan untuk memeriksa orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dengan meninggalkan tanah air, maka Majelis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

5. Bahwa bertitik tolak pada ketentuan tersebut Majelis akan memberikan jalan upaya agar mereka yang berada di luar negeri yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili sudah barang tentu dengan tetap berpedoman kepada azas praduga tak bersalah;
6. Bahwa jalan atau upaya Majelis Hakim yaitu dengan mengartikan tentang pengertian In Absentia tidak diartikan secara sempit akan tetapi diartikan secara luas, yaitu pemeriksaan In Absentia harus diartikan dan atau dikenakan kepada siapa saja yang menurut sangkaan dan dugaan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili secara In Absentia baik orang tersebut diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di dalam negeri dan telah dipanggil secara patut, sehingga hal yang demikian itu akan mempermudah pemerintah untuk memeriksa kepada yang bersangkutan;
7. Bahwa selanjutnya mungkin timbul pertanyaan, apakah hal yang demikian bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hak azasi

manusia, menurut hemat Majelis adalah tidak, karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan dalam hal ini telah diatur dala Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh karenanya apabila mereka akan menggunakan hak-haknya untuk beracara baik tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan dimuka persidangan dapat kembali ke tanah air;

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah:

1. Akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sangat besar;
2. Para Terdakwa telah menikmati hasil korupsi;
3. Para Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, terbukti setelah melakukan perbuatan mereka melarikan diri;
4. Perbuatan mereka para Terdakwa merupakan salah satu potensi yang merusak perekonomian negara yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter.

Sedangkan hal-hal yang merugikan tidak ada.

B. Proses Beracara serta Eksekusi Peradilan In Absentia dalam Perkara Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

1. Proses Beracara Peradilan In Absentia

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum acara khusus, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan perkara pada tindak pidana korupsi lebih didahulukan dari pada ketentuan-ketentuan yang diatur pula dalam KUHP, termasuk pemeriksaan secara In Absentia. Namun proses peradilan In Absentia pada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari proses peradilan tindak pidana umum yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 26 UU TPK, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

1.1. Penyidikan dalam Peradilan In Absentia

Penyidikan dalam perkara korupsi yang dihadiri terdakwa hampir sama dengan penyidikan dalam perkara korupsi yang tidak dihadiri terdakwa (In Absentia). Yang membedakan adalah penyidikan In Absentia tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat

identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan.

Ketidakhadiran tersangka untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, dituangkan pada Berita Acara sebagai catatan, bahwa tersangka telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir memenuhi panggilan permintaan keterangan dengan mencantumkan masing-masing nomor dan tanggal surat, alamat yang dituju, nama penerimanya dan relaas dari surat panggilan serta ditutup dengan tanda tangan penyidik yang mendapat perintah untuk melakukan permintaan keterangan.

1.2. Penuntutan dalam Peradilan In Absentia

Mengenai tuntutan pidana dalam peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan.

1.3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan dalam putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tidak dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Hal ini didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 yang berbunyi:

1. “Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri – Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwa meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh hakim.
3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.
4. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas,

supaya menolak atau tidak melayani Penasihat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.”

Atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 ini, kehadiran penasihat hukum terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim sejak awal persidangan perkara ini.

Dengan tidak dihadirinya terdakwa dan penasihat hukum terdakwa maka proses pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Hendra Rahardja dkk ini:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2001 No. Registrasi Perkara PDS-204/JKT.PST/07/2001 dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2001.

2. Pemeriksaan Alat Bukti

3. Pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi:

- a. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:

- Saksi : Sudarto (Karyawan Bank Indonesia)
- Saksi : Muhamad Hasjim, SE (Karyawan Bank Indonesia)
- Saksi : Efdinal, SE (Karyawan Badan Pengawas Keuangan)
- Saksi ; Iswanto Tedjadinata (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Hendy Susanto (Tim Likuidasi PT. BHS)

- Saksi : Hendro Suwono (Mantan Karyawan PT. BHS)
- Saksi : Arry Dharma (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Gunawan Santosa (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Djuhanda (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Puspa Lily Tanusatrio (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Kim Ha Tirto Kuntjoro (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Muchtar Suriadihardja (Tim Likuidasi PT. BHS)
- Saksi : Bambang Budiman (Mantan Karyawan PT. BHS/
Direktur Marketing)
- Saksi : Muh. Nur Tajeb (Mantan Komisaris PT. BHS)
- Saksi : Lanny Ratna Ekowati S.,SH (Notaris)
- Saksi : Lie Kessy Listyanto (Mantan Karyawan PT. Artha
Buana Sakti)
- Saksi : Drs. Andre Widiyanto (Mantan Dirut PT. BHS)
- Saksi : Hardi Susanto (Mantan Karyawan PT. Gaya Wahana
Abadi Sakti)
- Saksi : Eko Tjipto, SH (Ketua Tim Likuidasi PT. BHS)

b. Keterangan Saksi Ahli

Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:

- Saksi Ahli : Drs. Hasan Bisri, SE, MM.
- Saksi Ahli : Oei Hoey Tiong, SH

Saksi-saksi dan saksi ahli memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing.

4. Pembacaan Tuntutan

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2002.

5. Putusan

Perkara nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari senin 18 maret 2002 oleh H. Subardi, SH. MH, sebagai Ketua, H. Herri Swantoro, SH., dan H. Asep Iwan Iriawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari jumat 22 maret 2002 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Supangat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Jaksa Penuntut Umum, dengan tidak dihadiri oleh Para Terdakwa.

2. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perkara tindak pidana korupsi eksekusi sangat penting untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Eksekusi dalam perkara putusan nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST hanya dilakukan pada harta kekayaan

negara yang dikorupsi Para Terpidana. Sedangkan eksekusi badan Para Terdakwa tidak dapat dilakukan sehubungan Para Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Dengan adanya putusan pengadilan ini, Penyidik dapat mengeksekusi semua aset-aset kekayaan Para Terdakwa yang menjadi barang bukti yang berupa Tanah dan Bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti. Aset-aset negara yang telah dikorupsi yang berada di luar negeri juga dapat dieksekusi. Namun pengembaliannya membutuhkan proses yang panjang. Sedangkan eksekusi badan Para Terdakwa, Penyidik berupaya dengan meminta bantuannya Interpol untuk menangkap Para Terdakwa. Sebelumnya Penyidik sudah memasukkan nama Para Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Landasan peradilan in absentia yaitu a) para Terdakwa telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pula telah melakukan pemanggilan melalui surat kabar akan tetapi para Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan. b) Pemerintah saat ini telah berupaya segiat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. c) harta kekayaan atau asset-asset para Terdakwa yang diduga terkait tindak pidana korupsi dapat dieksekusi. d) para Tersangka yang berada di luar negeri yang terkait perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili. e) Majelis Hakim mengartikan tentang pengertian in absentia secara luas, yaitu pemeriksaan in absentia harus dikenakan kepada siapa saja yang menurut sangkaan dan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili secara in absentia baik orang tersebut diketahui keberadaannya maupun tidak diketahui keberadaannya, diluar maupun di dalam negeri.
2. Proses beracara dalam perkara in absentia hampir sama dengan perkara biasa yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di

sidang pengadilan. Yang membedakan adalah para terdakwa/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak hadir dalam proses peradilan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan para penegak hukum berani mengadili perkara korupsi yang para terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Hal ini agar adanya kepastian hukum dalam perkara yang diduga terjadi tindak pidana korupsi.
2. Disarankan agar adanya perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui hendaknya dibuat ketentuan mengenai peradilan in absentia sehingga proses hukum tidak berlarut-larut dan para terdakwa beserta harta kekayaannya dapat segera dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, David H. 1985. *Webster's Third New Dictionary*.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darwan, Prints. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Hamzah, Andi dan Dahlan, Irdan. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahkamah Agung RI. 2009. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*.
- Poernomo, Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Pope, Jeremy. 1996. *Tranparency International*.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Saleh, K. Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia

The Lexicon. 1978. *Webster Dictionary*.

Wojowasito. 1997. *Kamus Umum Belanda Indonesia*.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Web Page:

www.library.ohiou.edu.com

www.gsihaloho.blogspot.com

www.siddiqmads.wordpress.com